Universitas Sriwijaya - Palembang
Zulkarnain Ishak, M.A.

Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas Edsekutif – Legislatif dalam Desentralisasi Anggran Propinsi Sumatera Selatan
(The Need for Transparency and Executive – Legislative Accountability in Fiscal Decentralization in South Sumatra)

Dialog Nasional Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
(National Dialogue Workshop and Socialization on Regional Autonomy)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

July 20 – 22, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

PERLUNYA TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM DESENTRALISASI ANGGARAN PROPINSI SUMATERA SELATAN

Oleh :
Taufiqurrahman Ishak

Disampaikan Pada Dialog Nasional
"Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah"

diselenggarakan oleh :
Kerjasama IRIS University of Maryland-FE UNSRI-LPEM FE UI

20 Juli 2000, Palembang

PERLUNYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM DESENTRALISASI ANGGARAN PROPINSI SUMATRA SELATAN[1]

oleh : Zulkarnain Ishak[2]

Pendahuluan

Masa sebelum akhir 1999 merupakan masa dimana bangsa ini membuka lembaran Indonesia Baru, dan menutup lembaran lama yang sarat akan pembodohan, kebohongan, kemunafikan dan ketidakadilan. Pada lembar lama perjalanan sejarah bangsa yang sangat "mengsakralkan" kesaktian Pancasila, terdapat banyak andaian yang menganggap hampir semua sendi hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sama, atau seragam. Semua jadi mungkin terjadi karena acuannya adalah Tunggal Ika di kedepankan, Bhinneka dikebelakangkan, atau mufakat direkayasa menjadi superior serta musyawarah menjadi inferior, begitulah skenario yang terjadi.

Jawa sama dengan bukan Jawa, Kota identik dengan Desa, kata pra-sejahtera (miskin) hampir tak berbeda dengan sejahtera, dan ironisnya tidak sedikit kalangan beranggapan oknum pejabat identik pula dengan penjahat. Ini semua memungkinkan terjadi karena sebagaimana biasa menganggap semua sama dan satu. Padahal hati nurani tak pernah seragam dan tak pernah sama, tak gampang menyatu, bahkan tak pernah diketahui. Keseragaman memang membutuhkan pendekatan yang relatif mudah dan murah, namun dampak nya tidaklah mudah ditangani karena mahal.

Bukankah andaian ini identik dengan perilaku komunis yang sangat diharamkan, bahkan untuk meninjau ulang UU lama tentang larangan partai haram ini, menimbulkan polemik sangat gencar dari berbagai pihak. Ini pula cermin bahwa bangsa ini masih belum berlapang dada dalam menghadapi opini yang berseberangan.

---

1). Disampaikan pada "Dialog Nasional Workshop Dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah" kerjasama IPEG dan University of Maryland - FE UNSRI - LPEM FE UI. Dan pernah disampaikan pada "Diskusi Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penganggaran Propinsi Sumatera Selatan", Tanggal 20 Juli 2000.

2). Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unsri

Kesenagaman semakin solid manakala berbagai pihak yang berlabel: Wakil Rakyat, Pengadil, Penertib dan Pengaman, serta turut pula Pengajar atau Pemberdaya, semua seakan membiarkan atau memaklumkan keadaan *aneh* terus berlangsung secara sistimatik lebih dari tiga dekade.

Tulisan ringkas ini mencoba mendiskusikan berbagai aspek tentang pentingnya transpransi dan akuntabilitas (TA) anggaran, guna menuju keberhasilan pembangunan dalam era pemerintahan desentralistik. Apakah aspek penting TA ini telah dilakukan selama era Refermasi? Apakah dua aspek ini telah diketahui oleh kalangan legislatif, eksekutif, serta yudikatif (LEY)?. Jika dua aspek ini belum tampak, apa yang harus dilakukan selanjutnya, apakah tiga kekuatan LEY belum memahami?, dan mungkinkah LEY perlu diberdayakan sehingga masyarakat mulai dari akar rumput sampai puncak bumi tertinggi semakin berdaya? Paling tidak LEY menyadari dan memahami tugas, kewajiban dan hak, sedangkan masyarakat luas sebagai *stakeholder*, sangat perlu mengetahui proses yang terjadi.

Pada bagian berikut akan didiskusikan berbagai aspek seperti desentralisasi dan disintegrasi, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, fungsi dan kewajiban pengambil dan pengawas kebijakan.

Desentralisasi Vs Disintegrasi

Salah satu ciri sistem pemerintahan desentralistik ditandai dengan diistirahatkannya intervensi Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan daerah. Normatifnya adalah, Pemerintah Daerah lebih leluasa menggali dan mengelola keuangan sendiri. Keleluasaan ini akan menjadi penting karena daerahlah yang lebih mengetahui keadaan, masalah dan program yang diperlukan. Namun melalui perimbangan keuangan *dana alokasi umum (DAU)* dan *dana alokasi khusus (DAK)*, hal tersebut tidak berlaku.

Keleluasaan daerah diharapkan tidak hanya dalam pengelolaan, namun juga menggali sumber-sumber potensial pendapatan untuk menjalankan fungsi dan wewenang. Selama ini dana bantuan atau perimbangan keuangan pusat-daerah dalam bentuk DAK dan DAU, alokasinya sudah ditentukan Pemerintah Pusat, sehingga daerah hanya menjalankan dan membelanjakannya sesuai dengan petunjuk dan peruntukkannya.

Keluarnya PP No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan, belum sepenuhnya menyentuh wewenang daerah Kabupaten dan Kota. Karena PP tersebut hanya menyebutkan wewenang Pemerintah dan Propinsi, padahal UU No 22 tahun 1999 mengatakan bahwa otonomi berada pada daerah Kabupaten/Kota. Apakah Pemerintah yang membuat PP ini mengetahui keadaan dan potensi daerah Kabupaten.

Dalam menggali sumber-sumber potensial pendapatan daerah, perlu memperhatikan berbagai prinsip seperti *equity, certainty, economical, adequacy, dan transprancy.* Dalam penggalian sumber-sumber pendapatan, daerah harus menghindari pengurasan berlebihan sumber-sumber ekonomi daerah, karena akan membahayakan lingkungan dan tingkat persaingan antar daerah. Tingkat persaingan daerah lebih lanjut akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Diharapkan dengan diterapkannya sistem pemerintahan yang desentralistik, beberapa kemajuan dapat dicapai. Kemajauan dapat dicapai dari sistem ini karena: *Pertama,* tanggung jawab politik dan tanggung jawab dalam pengelolaan akan lebih besar. *Kedua,* dari sistem ini diharapkan pula mampu meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan "tidak semu". *Ketiga,* distribusi hasil dari pembangunan dan pertumbuhan diharapkan membaik. *Keempat,* dengan demikian pembangunan Indonesia diharapkan akan lebih sehat dan aktif

Kemajuan dan perbaikan yang diharapkan akan menjadi nyata jika berbagai pihak terutama pihak yang terkait paham dan mengeti tugas

dan fungsi mereka denagn baik. Akan tetapi di samping kemajuan dan kebaikan dari sistem ini, akan terdapat pula beberapa resiko, jika sistem ini tidak disiapkan secara baik sejak dini. Dengan mengetahui resiko dari program desentralisasi, maka beberapa pilihan bijak dapat diambil guna terselenggarannya sistem ini.

Resiko dari sistem desentralisasi antara lain: Pertama, Proses mulai dari tahap persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang kurang baik, akan mengancam kebaikan sistem desentralisasi tersebut. Kedua, pengalihan pertanggung jawaban (devolution) penerimaan dan pengeluaran, akan berdampak terhadap stabilitas makro. Ketiga, tidak berdayanya pengawasan pelaporan dan pengelolaan akan berakibat semakin maraknya KKN, karena mengerbitnya raja-raja daerah. Untuk mengeliminir dampak yang tidak diinginkan, maka aspek akuntabel dan transparansi menjadi amat penting diterapkan.

Aspek akuntabel (dijelaskan lebih lanjut) bermakna bahwa Pemda mengutamakan kepentingan warganya dengan cara mempertanggung jawabkan pelaksanaan otonomi kepada masyarakat melalui wakil rakyat. Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam akuntabel adalah pendidikan politik masyarakat lokal yang pada gilirannya secara agregat akan menyumbang pendidikan politik secara nasional. Pendidikan politik yang baik diharapkan mampu mencegah terjadinya disintegrasi. (Suwandi, 2000: h. 4)

Bersaing dan Bertanding

Dilaksanakannya otonomi daerah tentu akan berdampak positif bagi daerah. Namun dalam pelaksanaanya tentu akan menghadapi berbagai masalah yang makin berkembang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang desentralisitik diperlukan fungsi dan wewenang daerah, serta tersedianya dana untuk menyelenggarakan fungsi dan wewenang tersebut, Namun yang penting adalah mengedepankan akuntabilitas dalam berbagai aspek pembangunan.

Akuntabilitas yang baik mencerminkan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan mekanisme keseimbangan. Jika hal ini tak

berjalan, maka daerah yang mempertahankan sistem pemerintahan yang [illegible], tidak perlu banyak berharap dan terkejut jika daerahnya bukan menjadi prioritas [illegible] bagi pihak pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan diperlukan oleh daerah untuk tumbuh kembangnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik serta keamanan. Daerah lain yang lebih baik menjalankan aspek akuntanbilitas, akan menjadi pemenang dalam persaingan.

Satu daerah tentu akan menghadapi persaingan dengan daerah lain misalnya dalam meraih investor. Daerah yang kaya akan SDA seperti Sumsel, belum tentu mampu menarik investor, jika beragai kemudahan yang diperlukan tidak disiapkan daerah ini. Dengan demikian antar daerah, dan antar kabupaten akan mengahadapi persaingan dalam banyak aspek.

Persaingan tersebut akan terjadi dari beberapa aspek antara lain: Pertama, dalam penyelenggaraan "law enforcement (LE)". Tentu daerah yang menjamin LE diharapkan akan unggul dalam menghimpun modal dan mengundang investor menonamkan modal. Kedua, daerah akan bersaing dalam hal stabilitas keamanan. Daerah yang lebih menjamin unsur kedua ini akan menjadi incaran banyak pihak. Ketiga, persaingan akan terletak pada masalah intelektual dan modal sosial atau kepercayaan masyarakat.

Keempat, persaingan antar daerah akan pula terletak pada aspek *atitude, compliance, good governence,* serta anti KKN. Kelima, pemenang dalam persaingan antar daerah akan tecermin dalam aspek birokrat yang *superior.* Daerah yang masih mempertahankan sistem birokrat yang tidak mendukung dinamika pembangunan, akan menyaksikan daerah lain meraih keuntungan. Keenam, jelas akan timbul persaingan antar daerah dalam hal ketersediaan baik kualitas dan kuantitas infrastruktur dan kemudahan publik lainnya, terkahir Ketujuh, antar daerah akan bersaing dalam aspek pemasaran hasil produksi barang dan jasa.

Aspek-aspek persaingan ini tidak berdiri sendiri, dalam pengertian kebaikan satu aspek akan berdampak ke lain aspek.

Permasalahannya adalah perlu dengan nyata dilakukan pembenahan dan introspeksi penuh dengan kebesaran jiwa. Menemukenali berbagai kelemahan sejak dini akan lebih baik, kaarena memperbaiki, dan berbenah diri ketika masalah sudah menumpuk dan membaku akan sulit diperbaiki. Kelemahan Pemda selama ini tidak terlepas dari bagian dari skenario besar nasional sejak rezim Soeharto.

Saat ini adalah masa untuk berbenah dan memperbaiki diri, semoga yang lalu menjadi tetap berlalu dan tak akan pernah kembali. Untuk terlaksananya hal di atas harus dilakukan secara bersama. Personil Pemda harus menghindari persaingan dalam mengejar *jabatan dan eselon*, yang kadangkala tak berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Saatnya untuk bersaing dalam hal *pelayanan* yang baik sesuai dengan tuntutan global.

Pada Eera Global, jabatan dan eselon hampir tak berarti terlebih jika tak diiringi dengan kemampuan diri secara nyata. Sudahkah Pemerintah Daerah Sumatra Selatan merencanakan atau melaksanakan rencana untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lain?. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, maka daerah lain yang akan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. Propinsi Lampung telah menyiapkan Perda yang mengatur tentang retribusi angkutan kereta api, untuk tiap unit Batubara dan Semen klinker yang melalui Propinsi Lampung. Propinsi yang tidak memiliki sumber untuk dua komoditi ini, telah siap untuk menikmati jalur yang dilalui kedua barang tersebut.

Bukan ingin mengecilkan kerja keras yang dilakukan Pemda Sumsel selama ini, namun kenyataan menunjukkan bahwa Pemda Propinsi dan Kabupaten belum punya rencana jelas untuk menghadapi otonomi dan persaingan dalam otonomi. Kesibukan selama ini hanya menjalankan kerja rutin yang telah membaku, dan belum terlihat hasil dalam merubah pola kerja lama berdasarkan arahan dan petunjuk atasan. Sistem kepegawaian Pemda perlu diperbaiki, karena belum mampu mencetak personil yang

profesional yang sanggup menggagas ide-ide cemerlang yang kompetitif dan komperatif sesuai dengan tuntutan global.

Akuntabilitas dan Bahaya

Hal yang sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan apapun pakannya adalah aspek akuntabilitas. Secara umum siapapun yang diberi wewenang untuk menyusun dan melaksanakan suatu kebijakan seharusnya diwajibkan untuk menjelaskan tindakannya kepada "pihak terkait" (Ali & Royani, 2000). Jika hubungannya dengan keuangan maka pihak yang diberikan wewenang *harus* memberikan laporan mengenai penguasaan atas uang-uang publik (penggunaan sesuai peruntukkan) dan kinerjanya.

Aspek akuntabilitas ini amat diabaikan selama rezim Orba, bahkan sengaja direkayasa dengan menciptakan jaringan korupsi gurita, *occtophussy corruption net-work system*. Sehingga relatif susah dilacak maupun ditindak. Banyak penguasaan uang publik tidak sesuai dengan peruntukkannya. Berbagai kasus keuangan yang diungkap oleh BPK, dan kasus lain yang muncul akhir-akhir ini, merupakan bukti aktual yang kesikian, bahwa penduduk negara ini *tidak tertib* mentaati aspek akuntabilitas.

Tidak sedikit pengajuan proyek kerja dari Dinas dan Kantor yang ada di Sumatra Selatan yang ditolak, namun penolakan kurang jelas alasananya, sehingga kerja keras, peran serta yang diharapkan tidak optimal dijalankan, serta misi dan visi hanya menjadi retotika belaka.

Suata hal yang masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan keuangan adalah seperti yang diungkap dalam bahasa Inggeris berikut: *work got less (or get no pay), not work got pay (or much pay)*. Paham yang diungkap dalam bahasa asing ini masih tetap berlangsung saat ini. Akibatnya kerja keras, partisipasi dan komitmen untuk mencapai suatu tujuan tak sepenuhnya terwujud, karena tidak berlakunya kompensasi yang

layak. Dampak lain yang juga penting dalam pembangunan adalah luya kreatifitas dan inovatif pegawai terbenam. Seharusnya ungkapan di atas diganti menjadi "equal work, equal pay" Kompensasi dan pembayaran disesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Tidak tertibnya bangsa ini, menjadi masalah utama terjadinya krisis total yang berkepanjangan. Tidak sedikit oknum dari banyak kalangan, yang tidak *committed* atau tidak *istiqomah* dengan tugas dan kewajibannya. Sering menganggap sepele, menunda tugas dan pekerjaan, sehingga berdampak sangat luas terhadap timbulnya masalah baru, bahkan berpeluang menurunkan masalah lanjutan.

Hal yang tak kunjung kasti terjadi ini, jelas tidak berdiri sendiri. Keadaan dan lingkungan telah menciptakan manusia-manusia yang tidak tertib dan bertanggung jawab. Kondisi yang membaku sejak lama tidak mungkin dapat ditiadakan dengan begitu cepat. Penanggulangan membutuhkan suatu proses yang berdimensi banyak dan memakan waktu. Pendidikan sebagai contoh merupakan hal sangat penting untuk menghasilkan manusia-manusia arif yang mempunyai hati nurani.

Jika sistem pendidikan telah menjadikan bangsa ini tidak disiplin, dan cenderung anarki, maka pendidikan tersebut harus dibenahi dan diberdayakan, serta institusi-institusi pendidikan perlu diberi wewenang dan harus otonom. Sehingga dunia pendidikan tidak menghasilkan SDM yang berlabel KKN.

Cakupan aspek akuntabilitas sangat luas yaitu mencakup aspek politis, manajerial dan legal. Dalam aspek keuangan akuntabilitas mencakup sumber keuangan dari mana?, apakah taat pada ketentuan hukum dan administrasi keuangan?, apakah telah dicapai efisiensi dan kehematan?, serta apakah hasil program yang dilaksanakan telah mencapai hasil?, jika belum kenapa dan mengapa terjadi dan bagaimana hasil evaluasi?

Studi Banding dan Dana Gelap

Sebagai ilustrasi, saat ini pengambil dan pelaksana keputusan melakukan studi banding di banyak negara, tentunya dengan tujuan yang amat mulia "guna mensejahterakan rakyatnya". Berbagai studi banding yang banyak menguras dana rakyat ini tidak jelas dimana akhir dan tindak lanjutnya. Begitu studi selesai perbandingan lanjutanpun usai, bahkan terlupa bahwa ada hutang yang harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat luas.

Membandingkan bagaimana negara luar buat terminal atau pelabuhan, melihat dan membandingkan bagaimana rakyat di negara luar negeri membuang dan mengelola sampah, melihat dan memperhatikan bagaimana negara lain membuat trotoar, selokan, jalan dan bangunan yang tahan untuk setiap musim, mengelola pasar, serta membandingkan bagaimana negara luar mengelola proses belajar dan mengajar, serta studi lainnya telah banyak dilakukan.

Semua studi tersebut mungkin sering dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sumatra Selatan. Namun apa kelanjutan studi "nobody knows", namun seharusnya masyarakat tidak dibodohi. Semua sudah mengetahui perilaku, pola, etos kerja orang dari negara yang dibandingkan sangat berbeda. Rakyat Negara matahari tebit memiliki istiqomah yang relatif baik. Rakyat dan Pemerintah Polisi dunia lebih Islami dari negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Lantas apa manfaat studi banding tersebut? merekalah yang tahu.

Dana studi banding akan lebih murah jika dilakukan di dalam negeri sendiri. Terminal Bungurasi di Jawa Timur merupakan terminal terbaik di Indonesia, maka selayaknyalah studi banding Sumsel yang ingin membuat terminal, pergi melancong ke Jawa Timur, yang geografinya hampir sama dengan Sumsel atau Kota Palembang. Ingin mempertahankan slogan retorik B.A.R.I dianjurkan studi ke Sumatra Barat atau Jambi. Ingin menumbuh

kembangkan usaha kecil kripik dan makanan kalang pergilah ke Lampung.

Jika studi banding biasanya para Komandan yang pergi, namun jika rapat penting, koordinasi antar instansi, pemberdayaan masyarakat desa, dan lainnya, maka staf yang kurang paham dan tidak mempunyai wewenang yang akan hadir. Usai acara si Komandan sepanjurnya tentu, dan diharapkan *akan membagi* insentif kepada stafnya yang secara tekun mengikuti koordinasi.

Sistem anggaran yang baik adalah harus dan harus transparan: Mulai dari proses persiapan, eksekusi, pengelolaan anggaran serta sampai tahap evaluasi dan tindak lanjut. Harus akuntabel baik individu maupun kelompok, efisien dalam penggunaan sumber-sumber serta efektif dalam capaian penggunaan sumber-sumber tersebut.

Pungutan liar dan tak resmi dalam mengurus surat dan proyek dari Dinas dan Instansi terkait, tak jelas kemana pergi dan dimana dibukukan. Pihak konsumen (stakeholder) lazimnya tidak menerima *tanda pembayaran.* Berarti dana yang telah dibayarkan konsumen berpeluang dengan bebas dipakai untuk tujuan yang lain. Jika pungutan yang dilakukan sesuai Perda, maka pencatatanya harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan.

Karena tidak dicatat berarti dapat dianggap tak resmi, namun pelanggan sangat memaklumi dan penuh pengertian, maka tak dicatat dan tak menerima tanda pembayaran. Ini dapat dilihat pada APBD, yang tetap kosong pada kolom penerimaan Dinas-Dinas. Padahal secara *de facto,* semua tahu bahwa ada pembayaran dari Kantor dan Dinas tertentu untuk suatu *jasa* tertentu yang diberikan.

Ilustrasi berikut perlu mendapat perhatian, untuk melihat bagaimana berbagai upaya dari oknum tertentu bersemangat memungut dana segar dari masyarakat tanpa aturan dan surat perintah yang jelas. Kasus seorang pengrajin rotan yang berlokasi di pinggir kota didatangani beberapa Oknum Pemda Kotamdya, dan

mengaku dari bagian pajak dan retribusi. Si pengrajin diminta untuk membayar beberapa retribusi, dan pajak lain dengan hanya menodalkan pakaian PNS dan kertas yang bertuliskan jumlah dana yang harus dibayar lebih kurang Rp 450.000,-

Kertas yang disodorkan oknum Pemda tidak ber-kop surat, dan oknum tidak memiliki surat tugas. Oleh karena si pengrajin kurang pengetahuan, maka hari berikutnya pengrajin minta tolong ke teman untuk membahas masalah tersebut, dan dia selanjutnya diberdayakan. Akhirnya oknum dari Pemda tidak pernah muncul dan menagih pungutan yang tak layak tersebut. Dapat dibayangkan, bila hal serupa terjadi pada pelaku pembangunan yang sangat lugu akan liku-liku oknum tak bertanggung jawab.

Perlu pula diwaspada bahwa dengan sistem pemerintahan yang desentralistik diharapkan mampu mempercepat proses dan realisasi pembangunan sampai ke masyarakat perdesaan. Namun tetap harus diwaspadai bahwa desentralisasi dapat menimbulkan petaka jika tidak mampu memperbaiki aspek politis, manajerial dan legalitas.

Petaka karena desentralisasi dapat pula berdampak terhadap meningkatnya disparitas, dan hal ini merupakan induk untuk terjadinya keinginan pemisahan. Selanjutnya desentralisasi yang tak baik dapat pula mengganggu stabilitas, memperlemah efisiensi, dan bahkan desentralisasi dapat mengalami kegagalan karena semakin *solid* nya korupsi. Untuk itu peran lembaga legislatif dan yudikatif di tuntut untuk lebih pro-aktif dalam mengemban amanah rakyat, dan saatnya membelakangkan retorika yang tak bermakna.

Peran dan Fungsi

Fungsi pokok DPR dan DPRD adalah: Pertama, sebagai unsur lembaga yang tugasnya membina dan mengawasi Pemerintah Daerah. Kedua, fungsinya sebagai wakil rakyat daerah dalam menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat demi meningkatkan

kesejahteraan rakyat di daerah. Tugas dan wewenang DPRD, sesuai dengan UU no.22/1999 ada sebanyak 7 (tujuh) jenis antara lain "mengadakan pengawasan". Di samping tugas, Lembaga legislatif juga mempunyai 8 (delapan) hak. Hak DPRD yang berhubungan dengan pengawasan adalah mengadakan penyelidikan. DPRD sesuai dengan UU no 22/1999 juga memiliki kewajiban antara lain: memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitas tindak lanjut penyelesaian.

Dewan perwakilan rakyat Sumsel telah melakukan beberapa fungsi pengawasan di berbagai BUMN akhir-akhir ini, namun anggota dewan perlu pula melakukan penyelidikan ke Dinas-Dinas yang diduga menjadi sarang tempat berkembang biaknya korupsi. Wakil Rakyat perlu mengawasi dan menyelidiki Dinas PU, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga, Dinas Trasnmigrasi dan PPH, Kehutanan, BUMD, PLN dan lainnya. Wakil Rakyat mesti lebih banyak mengejar bola, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, dan sedapat mungkin menghindari jangan sampai bola datang sendiri.

Untuk berjalannya mekanisme ini, maka anggota DPR/DPRD seharusnya tidak menerima pembayaran dalam bentuk apapun juga, dari pihak tertentu guna mendukung keinginan pihak tertentu tersebut. Misal tidak layak menerima pembayaran dari Dinas agar rancangan proyek yang diajukan berhasil, juga tidak layak dan tidak wajar menerima pembayaran dari pihak manapun untuk mensukseskan pihak tertentu agar memenangkan posisi tertentu dalam pemerintahan. Pihak yang diinspeksi, biasanya dalam studi banding, tidak diperkenankan memberi uang dan sejenisnya, karena tim inspeksi lazimnya telah mendapat SPJ.

Andainya anggota dewan tidak dapat menolak pembayaran, maka akan lebih baik jika oknum yang menerima melaporkan ke Dewan tentang pembayaran yang diterimanya dari *pihak penekan*.

Sehingga khalayak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pada dan oleh wakil rakyat yang terhormat tersebut.

Jika ini tak berhasil dilakukan maka kualitas wakil rakyat tersebut diragukan, dan untuk tujuan yang lebih baik diperlukan reformasi pemilihan yang benar-benar kehendak bawah, bukan rekayasa seolah kehendak arus bawah.

Penutup

Aspek transparansi dan akuntabelitas penganggaran Pemda Sumatra Selatan memegang peran besar dalam terlaksananya secara baik sistem pemerintah yang berotonomi. Kesalahan selama ini dan terjadinya krisis yang telah pernah mencapai stadium tinggi, merupakan bukti bahwa kedua aspek ini sangat diabaikan. Oleh karenanya Rezim Pemerintah sekarang mengalami banyak kesulitan untuk melacak setiap aspek penyelewengan uang rakyat.

Jika di daerah masih belum memiliki bahasa yang sama, dalam pengertian dan pelaksanaan otonomi, maka proses jangka panjang daerah ini menuju ke sana memerlukan dana dan tenaga

Mekanisme dan sistem pemilahan daerah perlu ditinjau kembali atau memperbaiki sistem pemilihan umum yang lalu, sehingga siap untuk menjadi mitra ekskutif. Sistem pendidikan otonom harus pula diaplikasikan di setiap perguruan, karena sistem ini akan memacu tumbuh kembangnya daya kreativitas, dan daya inovatif. Oleh karena itu pendidikan harus dikembalikan ke fungsi utama dalam mencetak manusia bertaqwa, berinisiatif dan bertanggung jawab. Serta bebas KKN.

Sumber Rujukan

1. Alm, James and Bahl, Roy, *Decentralization in Indonesia. Prospects and Problems*, Departement of Economics. The School of Policy Studies. Geodgia State university, USA. Presented at the Workshop on Strengthening Regional University Capacity for Decentralization. LPEM-FE UI and IRIS, 5-14 March 2000
2. Ali, Munir M & Royani Farhan. *Accountability and Monitoring*. Presented for the Workshop on Strengthening Regional University Capacity for Decentralization. LPEM-FE UI and IRIS, 5-14 March 2000.

5. [illegible] *Indonesia: Decentralization and [illegible]* [illegible]
6. [illegible] *Masalah [illegible]* [illegible]
7. Ishak, Zulkarnain. *[illegible] Masyarakat [illegible]* [illegible] Pembangunan [illegible] Pemerintah Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, [illegible] 23 Nopember 1999
8. [illegible] pada [illegible] Fakultas [illegible] 19 Desember 1999
9. Ishak, Zulkarnain. *Pendekatan [illegible] Dalam Rangka Kendalian MAB* Disampaikan pada Seminar [illegible] Pembangunan [illegible] Dalam Rangka Desentralisasi diselenggarakan oleh [illegible] 19 Desember 1999
8. Ishak Zulkarnain. *Analisis Kondisi & Prospek Ekonomi Menyongsong Propinsi BABEL*, disampaikan Pada Seminar Nasional *Analisis Komprehensif Aspek-Aspek Strategis Menyiapkan Terbentuknya Propinsi Bangka - Belitung* Diselenggarakan oleh: IDBA - IKPB Palembang 3 Juni 2000
9. Ishak, Zulkarnain. *Agenda Persiapan Desentralisasi di Sumatra Selatan.* Makalah disampaikan pada Second workshop on "Strengthening the Indonesian Capacity to Support Decentralization" Jakarta 5 - 10 Juni 2000
10. Ishak, Zulkarnain. *Kebijakan & Partisipasi Publik Dalam Otonomi Daerah.* Disampaikan Pada Diskusi Panel Prespektif Ekonomi Politik Daerah Otonomi dan Prospek Penerapannya di Sumatra Selatan. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum YARSI Pusat bekerjasama dengan Koordinator Pusat Kajian Strategi Independen Srivijaya Sumsel, Juli 2000.
11. Mahi, R, et all. *Alternative Local Revenue and Tax Sharing:* Some Lessons on the Implementations of Law No 25, 1999. Presented at the seminar on "Indonesia: Decentralization Sequencing Agenda", March 20-21, 2000 Auditorium Plaza Mandiri Jakarta
12. Polishchuk, Leonid. *Legal Initiatives in Russian regions: Determinations and Effects,* Presented at Workshop on..... In Jakarta 2000
13. Piperno, Stefano *Fiscal Decentralization in Italy:* Some Lessons. Presented at the seminar on "Indonesia: Decentralization Sequencing Agenda", March 20-21, 2000 Auditorium Plaza Mandiri, Jakarta
14. Prud'homme, Remy. *The Danger of Decentralization.* The World Bank Research Observer, Vol 10, no.2, August 1995, pp. 201-220.
15. Polischuck, Leonid. *"Russian Federalism, The Decentralization Fiscal Path"*, World Economic Affairs, winter 1999.
16. Suwandi, I Made, Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah Sebagai Tindak Lanjut UU 22 dan UU 25 1999 Disampaikan pada Workshop on: Strengthening Regional University Capacity for Decentralization. UPLM FE UI and IRIS, 5-14 March 2000.